

ANALISIS PENGALIHAN ANGGARAN SEBAGAI SOLUSI TERHADAP HAMBATAN EKONOMI MASYARAKAT PONOROGO AKIBAT COVID-19

Febrian Adi Nugraha¹⁾, Asis Riat Winarto²⁾, Rochmat Aldy Purnomo³⁾, Choirul Hamidah⁴⁾

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No. 10, Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Ponorogo

Email: febriannugraha979@gmail.com¹⁾, asiserwe@gmail.com²⁾, rochmataldy93@gmail.com³⁾,
choirulhamidah@umpo.ac.id⁴⁾

ABSTRACT

Ponorogo is one of the many region that is also seriously affected by the COVID-19 outbreak. The purpose of this research aims to analyze related activities made by the Ponorogo government, as an effort to overcome the economic barriers of society due to COVID-19. Based on the reports and facts in the field, the affected people are those who have not been covered by assistance programs such as PKH or BPNT, around 15.000 people. The method in this research is to find a variety of scientific literature, the latest, and valid form of media coverage, and scientific journals as a reference. Ponorogo government innovates policies by diverting the budget to help the process of the acceleration of handling COVID-19 with the main object is society. The result of this research concluded that the Ponorogo government had succeeded in coordinating and agreeing in the proses of determining the budget diversion policy. The said budget diversion is taken from a number non-priority budgets items, or in other words it can still be delayed. In this researches can be analyzed that of course the budget diversion policy has gone through various considerations and long-term calculations, so that effort to create economic stability can be carried out as soon as possible. However, what's need to be underlined is related to how the diversion of budget also creates other impact namely inhibiting development process like infrastructure, housing, settlement, increasing human resources, and so forth. The priority scale determined by the Ponorogo government in passing the crisis period due to COVID-19 is a manifestation of the principle of good government, that the basic needs of the society are the biggest responsibility (even more so in the era of disasters). In addition, the status of the red zone in Ponorogo itself does contribute to additional logical reasons for the government to make diversion budget precisely and directed. This research aims to analyze the diversion of budget, as a solution to the economic constrains of Ponorogo society.

Keywords: *Analyze, Diversion, Budget, Economic, COVID-19*

ABSTRAK

Ponorogo adalah salah satu dari sekian banyak daerah yang juga terkena dampak serius dari wabah COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan terkait yang dilakukan oleh pemerintah Ponorogo, sebagai upaya untuk mengatasi hambatan ekonomi pada sebagian masyarakat akibat COVID-19. Berdasarkan pemberitaan dan fakta di lapangan, masyarakat ter-dampak yang dimaksud adalah mereka yang belum ter-cover dalam program bantuan seperti PKH, maupun BPNT sekitar 15.000 orang. Metode dalam penelitian ini adalah dengan cara menemukan berbagai literatur ilmiah, terbaru, serta valid dalam bentuk pemberitaan media, dan jurnal-jurnal ilmiah sebagai acuan. Pemerintah Ponorogo melakukan inovasi kebijakan dengan cara pengalihan anggaran untuk membantu proses percepatan penanganan COVID-19 dengan objek utamanya adalah masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Ponorogo telah berhasil melakukan koordinasi dan kesepakatan dalam proses penentuan kebijakan pengalihan anggaran. Pengalihan anggaran yang dimaksud adalah diambil dari beberapa pos anggaran non prioritas, atau dalam arti lain masih dapat ditunda. Dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa tentunya kebijakan pengalihan anggaran tersebut telah melalui berbagai macam pertimbangan maupun kalkulasi jangka panjang, sehingga upaya untuk menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat pun dapat dilakukan dengan sesegera mungkin. Namun yang perlu digarisbawahi adalah terkait bagaimana pengalihan anggaran tersebut juga menciptakan dampak lain yakni menghambat proses pembangunan seperti infrastruktur, perumahan, permukiman, peningkatan SDM, dan lain sebagainya. Skala prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah Ponorogo dalam melewati masa-masa krisis akibat COVID-19 adalah sebagai wujud dari prinsip good government, dimana kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab terbesar (terlebih lagi di era bencana). Selain itu, status zona merah di Ponorogo sendiri memang turut menambah alasan logis tambahan bagi pihak pemerintah untuk melakukan pengalihan anggaran secara tepat dan terarah.

Kata Kunci: *Analisis, Pengalihan, Anggaran, Ekonomi, COVID-19*

1. Pendahuluan

Wabah COVID-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya *shock* (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada in-stabilitas ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara yang mengalami dampak cukup besar akibat COVID-19 dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global di antaranya terdapat 14 negara yaitu China, Indonesia, Hongkong, Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Perancis, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. COVID-19 menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat naik drastis, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga kemudian menyebabkan terjadinya inflasi di berbagai negara. (Rusiadi et al., 2020).

Dampak dari adanya wabah global COVID-19 pada tahun 2020 juga telah secara signifikan memberikan catatan merah bagi pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi di Indonesia, atau dengan kata lain pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi terhambat. Efek lain yang terjadi adalah melemahnya sektor-sektor ekonomi mulai tingkat mikro hingga makro (kecil-besar). Selain itu, jika ditelaah secara mendalam tentu hambatan kali ini adalah satu problematika besar dengan beberapa alasan kuat yang dapat dijadikan dasar seperti status negara Indonesia yang masih berkembang, kualitas SDM belum memadai, serta minimnya kemampuan dari pihak swasta sebagai penopang hajat hidup orang banyak.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meletakkan kebijakan dalam prioritas tertinggi yang dilakukan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah (dalam suatu negara), dan tujuan utamanya adalah menasar kepada sektor kesejahteraan masyarakat agar meningkat. Cara-cara yang dilakukan adalah melalui perluasan lapangan pekerjaan, sehingga tercipta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi, suatu usaha pembangunan dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan capaian pendapatan per kapita supaya negara-negara memiliki daya untuk menghasilkan *output* lebih banyak dibanding dengan pertambahan jumlah penduduk (Todaro dalam Hasibuan, 2014).

Stabilitas ekonomi merupakan suatu prasyarat dasar yang mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan kualitas dari pertumbuhan yang tinggi (Rusiadi et al., 2020). Saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia tentu menjadi lamban dan tidak stabil, karena secara langsung wabah COVID-19 telah memaksa pemerintah dan masyarakat untuk bertumpu pada sumbu masalah yang sama sehingga beban tersebut menjadi beban kolektif. Bagaimanapun, perekonomian merupakan pilar bersama dalam menentukan indeks pertumbuhan suatu negara. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki potensi peranan yang sama dalam menentukan sejauh mana arah pembangunan telah tercapai, melalui berbagai macam

usaha secara berkesinambungan. Hambatan yang terjadi akibat wabah COVID-19 adalah suatu masalah tanpa bisa diprediksi secara mendalam, dikarenakan kemunculan dan penyebarannya begitu masif.

Keadaan ekonomi adalah aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, karena setiap hari nya masyarakat bersentuhan langsung dalam pemenuhan kebutuhan primer. Siklus ekonomi menjadi faktor pendukung bagi manusia untuk bertahan hidup, dengan cara makan dan minum, serta menetap di suatu rumah tinggal. Di dalam suatu negara, tuntutan terbesar adalah dalam melakukan manajemen ekonomi bagi masyarakatnya dan memberikan jaminan kecukupan termasuk di Indonesia sendiri. Indonesia adalah negara yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan, dimana konsep negara kesejahteraan sendiri adalah memiliki hak maupun wewenang untuk ikut campur terhadap urusan kehidupan warga negara nya apalagi dalam bidang ekonomi (Hanoatubun, 2020).

COVID-19 sejak awal kemunculannya telah memberikan dampak buruk bagi kondisi perekonomian dunia termasuk Negara Indonesia sendiri, terlebih lagi pada sektor pariwisata, perdagangan, serta investasi. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana menyatakan bahwa telah terjadi penurunan pada sektor migas dan non-migas. Di samping itu negara China yang biasanya merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia secara otomatis menjadi terganggu kegiatannya karena China diyakini sebagai negara yang menjadi sumber munculnya COVID-19 (Nasution et al, 2020).

Oleh karena itu, dampak serius dari COVID-19 juga nampaknya mengancam laju ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Sehingga pemerintah dan masyarakat pun, mau tidak mau harus menyadari masalah ini. Keseriusan yang mungkin muncul di benak pemerintah dan masyarakat, bisa dikatakan sebagai satu bentuk kesadaran tinggi untuk berbenah dan merencanakan perbaikan ekonomi di tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Langkah jangka panjang maupun jangka pendek merupakan satu hal mutlak yang menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pihak pemerintah. Artinya pemerintah memegang peranan penting dalam rangka pengendalian kondisi perekonomian.

Penjelasan tentang hambatan laju ekonomi dan pembangunan di atas sejalan dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan dari mulai 2,5% hingga 0% selama masa pandemi berlangsung. Perkiraan ini didasari atas krisis yang terjadi di Indonesia, sehingga diprediksi melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu jika berbicara perihal sistem ekonomi, maka negara-negara lain termasuk Indonesia, menyanggah peran sebagai pihak yang mengalokasikan anggaran maupun sumber daya untuk kebutuhan individu maupun kelompok (Hanoatubun, 2020).

Salah satu contoh daerah di Indonesia yang telah melakukan langkah antisipasi dengan cara *refocusing* kebijakan anggaran adalah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan mekanisme pengalihan anggaran yang bersumber dari anggaran-anggaran non-prioritas dalam lingkup (Belanja Tidak Terduga), untuk kemudian dialihkan sebagai percepatan penanganan serangkaian problem akibat COVID-19. Anggaran yang sebelumnya telah dirancang untuk memenuhi sektor-sektor pembangunan secara menyeluruh, dengan terpaksa harus dialihkan untuk prioritas dan kepentingan masyarakat akibat dilanda krisis luar biasa.

Masyarakat penerima bantuan senilai puluhan Miliar di Ponorogo (sekitar 15.000 orang) adalah mereka yang selama ini belum ter-cover bantuan sama sekali seperti misalnya PKH (Program Keluarga Harapan), dan BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari pemerintah pusat. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kemenkeu, serta mengklaim bahwa Kemenkeu menyetujui secara prinsip. Selain itu sifat koordinasi yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo adalah lebih kepada pemberitahuan, sehingga Kemenkeu pasti akan memberikan koreksi apabila ke depannya ditemukan sesuatu yang dirasa kurang pas (Solopos, 2020).

Rencana pengalihan anggaran oleh Pemkab Ponorogo untuk mengatasi dampak ekonomi akibat COVID-19 sudah dimulai sejak jauh-jauh hari. Rencana awal, bantuan akan diberikan kepada masyarakat berupa paket sembako senilai Rp 200.000 dan berlangsung selama 3 bulan (terhitung sejak bulan April 2020). Kemudian Pemkab Ponorogo melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono, juga menyatakan telah melakukan upaya validasi data penerima dengan cara menugaskan Dinas Sosial serta Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni juga menyatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah mengajukan untuk mendapat bantuan yaitu dari kelompok pekerja pijat tuna netra dan tukang becak karena penghasilan mereka memang turun secara drastis. Lebih dari itu Ipong Muchlissoni juga mengklaim bahwa warga masyarakat yang menjalani isolasi di rumah sakit juga akan mendapat bantu dari Pemkab. Kemudian bantuan berupa pembagian masker secara gratis juga dilakukan dengan cara menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa di Ponorogo, agar menyediakan anggaran untuk pembelian masker dan diberikan kepada warga (Solopos, 2020).

Kewenangan dari pemerintah Ponorogo dalam mengalihkan anggaran, tentunya didasari atas amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bagi setiap pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa kewenangan yang melekat adalah seperti perihal pengendalian, pengumpulan, maupun penyaluran uang (anggaran) dan juga berupa barang. Kemudian pemerintah daerah yang dimaksud adalah dengan level kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten/kota (Priyono, 2009).

Tersendatnya perekonomian masyarakat di daerah-daerah, juga otomatis menjadi ancaman besar bagi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengapa hal ini

terjadi? Karena daerah merupakan sektor penyokong utama dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia, di sisi lain luasnya wilayah dan kepadatan jumlah juga menentukan efektivitas suatu daerah dalam memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional.

Akibat yang diderita karena COVID-19, pada dasarnya memang melemahkan daya pemerintah dan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Ilustrasinya adalah ketika aktivitas perekonomian banyak dibatasi, otomatis pemasukan menurun. Maka efek yang sangat mungkin muncul sebagai sumber utama adalah, himpitan ekonomi bagi masyarakat kecil sehingga lambat laun juga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Siklus tersebut sejalan dengan penjelasan dari Ketut (2020) yang menyatakan bahwa: *“segala pembatasan aktivitas, pengendalian, dan pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 memiliki potensi untuk mengganggu perekonomian nasional. Contohnya adalah pada operasi produksi, distribusi, dan output pemasaran, sehingga sektor ekonomi menjadi goyah. Imbas yang paling dominan dirasakan adalah mandegnya sektor pariwisata, perdagangan, transportasi serta segala sektor jasa terkait”*.

Jika kembali lagi mengacu pada pengalihan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Ponorogo, maka sejatinya langkah tersebut termasuk dalam kategori program potensial karena mampu mendatangkan alternatif baru untuk melewati masa pandemi COVID-19 saat ini dengan mengesampingkan berbagai rencana pembangunan fisik, infrastruktur, lingkungan, dan lain sebagainya. Langkah konkrit dari Pemkab Ponorogo juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa: *“esensi utama dari pembangunan adalah lebih kepada progress perbaikan kesejahteraan masyarakat secara kontinyu, serta ditandai dengan pertumbuhan ekonomi secara positif”* (Saragih dalam Susilastuti, 2011).

Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk menganalisis tentang bagaimana bentuk pengalihan anggaran dan dampaknya kepada masyarakat Ponorogo di masa pandemi COVID-19 berlangsung? Apakah upaya tersebut juga mampu untuk membantu meminimalisir kelesuan perekonomian nasional?.

2. Pembahasan

A. Ekonomi Sebagai Pondasi Negara

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk melakukan perbaikan kualitas kehidupan manusia yang berorientasi kepada kesejahteraan dan taraf hidup secara menyeluruh. Melalui pembangunan ekonomi, berbagai macam variabel permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, lapangan pekerjaan, maupun tingkat pemerataan akan menjadi lebih baik. Selain itu, pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang ada serta kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut (Harahap, 2020).

Ekonomi merupakan satu bidang sangat vital dalam menentukan bagaimana arah pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini negara berperan sebagai aktor utama untuk

menata dan mengelola keadaan perekonomian, melalui *output* berupa kebijakan-kebijakan. Keadaan ekonomi juga identik dengan bagaimana kondisi sosial masyarakat, karena negara pada dasarnya bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang faktanya selalu dinamis. Apalagi ditambah dengan luasnya wilayah di Indonesia, sehingga munculnya banyak daerah juga turut menjadi faktor penentu bagi suatu negara (pemerintah) dalam mencanangkan kebijakan (*policy*).

Keadaan ekonomi dalam suatu negara, biasanya melambangkan ukuran dan capaian yang telah diperoleh. Serangkaian capaian tersebut merupakan indikator dalam mendeteksi kemajuan maupun kemunduran dari prospek ekonomi suatu negara, sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun dapat diketahui. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, namun substansi yang dikehendaki adalah terkait dengan bagaimana suatu proses pertumbuhan itu dilalui. Selain itu pembangunan yang baik sejatinya tidak hanya memfokuskan pada aspek fisik dan keuntungan bisnis saja, akan tetapi seharusnya memang memberikan prioritas tertinggi kepada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan sosial yang terjadi pada lapisan masyarakat (Sukwika, 2018).

Cakupan wilayah yang besar adalah suatu aset potensial bagi suatu negara, termasuk di Indonesia. Mengapa demikian? Karena potensi tersebut dapat mendatangkan prospek ekonomi yang lebih baik melalui dibukanya lahan-lahan pengembangan dan sektor-sektor usaha. Tak ayal jika prospek dan potensi ekonomi adalah program prioritas bagi setiap negara, untuk menuju terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan memiliki esensi yang luas, karena bukan hanya sekedar persoalan pangan semata. Dalam istilah lain, dampak pembangunan ekonomi pada suatu negara juga mungkin berdampak pada beberapa persoalan mendasar seperti terciptanya keamanan dan kestabilan sosial, sebagai wujud dari kokohnya kondisi ekonomi.

Kewenangan paling besar dalam melakukan manajemen terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia yang paling besar adalah menjadi tanggungjawab pihak pemerintah. Pemerintah memiliki banyak peran dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan mengikuti perkembangan zaman. Terbentuknya konstruksi perekonomian nasional merupakan ranah yang bisa digencarkan oleh pemerintah melalui penerapan berbagai macam kebijakan-kebijakan, dimana kebijakan yang dibuat adalah bertumpu memadai nya kesediaan anggaran serta ditujukan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak (Sari et al., 2016).

Upaya untuk memahami peran pemerintah menjadi begitu penting, karena laju pertumbuhan ekonomi memang tidak semata-mata dapat diukur hanya dari urusan pembangunan fisik semata. Dalam tujuan yang lebih jauh, justru kesejahteraan masyarakat adalah tolok ukur utama dan merupakan suatu wujud dari penerapan pembangunan ekonomi secara fundamental. Aspek kesejahteraan rakyat menempati posisi fundamental dalam mengukuhkan kuatnya pondasi perekonomian di

Indonesia, serta di sisi lain juga didukung oleh melimpahnya potensi Sumber Daya di berbagai daerah.

Kondisi ekonomi juga berkaitan erat dengan sosial masyarakat, yang tentunya perlu untuk dibangun pula. Jika berbicara mengenai proses, maksa juga perlu berbicara tentang sejauh mana proses tersebut berlangsung? Apakah proses yang dilalui juga mengalami hambatan, kemajuan, atau kemunduran?. Berbagai hal tersebut menjadi penting, agar supaya pemerintah Indonesia mampu untuk mengukur laju pembangunan. Parameter sosial ekonomi adalah hal mutlak dan tidak dapat ditolak, karena kedua hal tersebut adalah faktor rasional yang mana selalu mengalami dinamika setiap waktunya. Maksudnya adalah terciptanya keadaan dari sosial ekonomi masyarakat terkadang juga tergantung dari seberapa besar pihak pemerintah menaruh fokus dan kebijakan, sehingga keadaan ekonomi tidak serta merta berada pada kondisi sama. Garis besarnya, ketika kesejahteraan masyarakat masih berada dalam kondisi yang tidak baik maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dikehendaki juga otomatis belum bisa dikatakan baik (memenuhi standarisasi pembangunan).

B. Analisis Kebijakan Pengalihan Anggaran di Ponorogo

Bupati Ponorogo menyatakan bahwa, selain berbagai macam upaya secara teknis dan prosedural dalam menata masyarakatnya, di sisi lain pemerintah Ponorogo juga memiliki inovasi kebijakan dalam bentuk pengalihan berbagai macam anggaran yang telah terdata dalam APBD.

“Hampir semua anggaran dinas, anggaran renovasi rumah Bupati, serta berbagai macam anggaran yang tidak terlalu penting di tahun 2020 ini dialihkan untuk kepentingan percepatan penanganan COVID-19. Seluruh pengalihan anggaran ini akan masuk pada pos BTT (Belanja Tidak Terduga), dan kita sudah menyampaikan usulan ini kepada Pemprov Jatim” (Kominfo, 2020).



Gambar 1. Musrenbang Menyusun Ulang Anggaran
Sumber: Ponorogo.go.id, 2020

Selain itu, jika disimak dalam keterangannya Bupati Ponorogo juga menambahkan dan menyatakan bahwa laju ekonomi melambat, sehingga pihaknya terpaksa untuk mengatasi gejala ini dengan cara pengalihan anggaran sekitar 31 Miliar (walaupun ketika itu masih

menunggu persetujuan dari Pemprov Jatim). Adapun anggaran yang dialihkan tersebut memang direncanakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar terutama bagi masyarakat ter-dampak,. Dijelaskan bahwa dana tersebut diwujudkan dalam bentuk sembako selama 3 bulan dan besarnya hampir sama dengan BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BNPTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah) kepada sekitar 15.000 penerima. Lalu tak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan kepada jajaran tim medis dengan mengalokasikan anggaran untuk keperluan obat-obatan serta perlengkapan APD (Alat Pelindung Dasar).

Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Ponorogo Agus Pramono yakni:

“Peralihan maupun refocusing anggaran di masa mendesak tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak DPRD, namun cukup sebatas pemberitahuan saja. Secara teknis, refocusing anggaran secara prosedural hanya dapat dilakukan satu kali saja kecuali jika memang daerah tengah menghadapi situasi dan kondisi mendesak, sehingga peralihan anggaran bisa dilakukan ulang dengan cara mengambil besaran anggaran dari kegiatan-kegiatan diklat, perjalanan dinas, dan kegiatan sejenis yang memang memungkinkan untuk ditunda (Kominfo, 2020).



Gambar 2. Sekda Ponorogo
Sumber: ponorogo.go.id, 2020

Jika mencermati apa yang disampaikan oleh Sekda Ponorogo (Agus Pramono) maka sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok dalam pemaparannya. Selain itu sebenarnya prosedur penanganan bencana di Indonesia dalam hal keputusan peralihan anggaran, ternyata memang tidak rumit. Artinya tidak memerlukan pembahasan secara intens pada tingkat eksekutif maupun legislatif di daerah, mengingat lembaga sekelas DPRD hanya perlu diberi pemberitahuan saja (tanpa persetujuan). Selain itu efektivitas dari segi waktu dan tenaga menjadi lebih hemat, sehingga percepatan penanganan COVID-19 menjadi lebih optimal dan bisa langsung dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat dengan sesegera mungkin.

Pemkab Ponorogo telah berhasil mengelontorkan lebih dari 10 Miliar untuk menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya yang terus berlangsung. Masih ada sekitar 85 Miliar dana yang sifatnya siap untuk disalurkan, sumbernya adalah diambil dari pos anggaran

BTT (Belanja Tidak Terduga). Sekda Ponorogo Agus Pramono mengatakan bahwa dana sekitar lebih dari 10 Miliar yang telah digunakan adalah untuk beberapa bidang seperti kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta jaminan sosial.

“Kita dinilai sudah mampu untuk mengantisipasi kondisi ini dengan baik, sejak awal sudah bisa segera menyisihkan beberapa persen anggaran dari APBD, refocusing dan realokasi kita tepat waktu. Beberapa daerah sampai datang ke kita untuk mempelajari bagaimana cara kita melakukan itu” (Solopos, 2020).

Jika dianalisa, ide peralihan anggaran di tengah situasi bencana nasional memang dapat dikatakan sebagai satu langkah strategis yang tentunya mementingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Basis dari anggaran yang dimaksud adalah bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) sehingga otomatis harus melalui persetujuan Pemprov Jatim. Menyikapi prosedur tersebut, tentunya dapat dikatakan bahwa adanya inovasi dan kemauan dalam bertindak juga perlu dibarengi dengan prosedur efektif sehingga implementasinya menjadi berimbang. Ilustrasinya adalah ketika prosedur yang berlaku justru malah menghambat implementasi kebijakan di lapangan, maka capaian perbaikan dan percepatan penanganan COVID-19 menjadi terkesan lamban. Dalam arti lain, kebutuhan ekonomi rakyat yang mendesak sudah pasti akan turut menjadi faktor dalam melemahkan indeks perekonomian, sehingga agenda besar terkait cita-cita pembangunan nasional pun tak kunjung tercapai dikarenakan dukungan dari berbagai daerah sangat minim.

C. Hambatan Pembangunan Sebagai Imbas dari Belum Terkendalinya COVID-19

Prospek pembangunan di Ponorogo di tahun 2020 faktanya memang sebagian mengalami penundaan akibat dampak serius dari COVID-19 dan sempat menetapkan Ponorogo sebagai wilayah dengan status zona merah. Sangat rasional memang jika membludaknya kasus COVID-19 yang menjangkit masyarakat dijadikan sebagai parameter utama untuk menunda berbagai macam pembangunan strategis mulai dari infrastruktur, perumahan, permukiman, lingkungan, peningkatan SDM dan lain sebagainya.



Gambar 3. Suasana Musrenbang Ponorogo 2021 di Ruang Pemkab

Sumber: ponorogo.go.id, 2020

Bupati Ponorogo (Ipong Muchlissoni) memberikan keterangan kepada awak media, dikatakan bahwa ada beberapa sektor yang menjadi fokus perhatian serta telah dibuatkan perencanaan strategis di tahun 2021 mendatang (Kominfo, 2020). Diantaranya adalah:

- 1) Sektor pertanian, infrastruktur, dan pariwisata masih menjadi prioritas utama untuk pembangunan di tahun 2021
- 2) Pengembangan wisata berbasis kearifan lokal, serta penguatan UMKM dan Koperasi
- 3) Pengurangan program peningkatan SDM melalui Beasiswa, akibat dari pengalihan anggaran untuk COVID-19 di tahun 2020 ini
- 4) Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen atau naik dari target di tahun 2020 ini yang hanya 5,60 persen saja
- 5) Target tingkat kemiskinan sebesar 10,70 persen, berkaca dari tahun 2019 yang menyentuh angka 9,64 persen
- 6) Penargetan turunnya angka pengangguran terbuka sebesar 3,75 persen, atau turun target dari tahun 2020 ini sebesar 3,70 persen
- 7) Nilai tukar petani ditargetkan naik sebesar 107,85, dari target di tahun 2020 ini sebesar 107,25
- 8) Indeks pembangunan manusia ditargetkan naik menjadi 70,00, dari 68,90 di 2020
- 9) Tingkat ketimpangan ditargetkan turun, dari 0,35 menjadi 0,32

Jika dianalisa, berbagai indikator pembangunan di atas memang direncanakan untuk terjadi peningkatan di tahun 2021. Namun memang terjadi pengurangan anggaran pada sektor peningkatan SDM, sebagai akibat dari pengalihan anggaran untuk keperluan penanganan COVID-19. Sebenarnya sangat disayangkan jika upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM menjadi terhambat, sehingga putra-putri daerah yang memiliki potensi tidak akan dapat terserap sepenuhnya melalui program pengadaan Beasiswa pendidikan.

Pertimbangan pembangunan sejatinya adalah proses jangka panjang dan melalui keterlibatan berbagai pihak, walaupun pemerintah adalah motor utama dalam melakukan realisasi. Namun keterbukaan untuk terciptanya ide dan gagasan baru bukan lah sesuatu yang mustahil untuk dapat diserap dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya pemerintah Ponorogo telah menemui sejumlah permasalahan serius dalam meneruskan peningkatan kualitas pembangunan pada berbagai sektor, karena wabah COVID-19 adalah masalah di luar dugaan. Maka dari itu, kualitas dalam tata kelola pemerintahan di Ponorogo dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sedikit teruji. Bagaimanapun, keselamatan warga masyarakat adalah prioritas utama dan memang sudah seharusnya menjadi tugas utama bagi pemerintah dimana pun berada.

Selalu ada skala prioritas dalam merumuskan cara-cara untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sesungguhnya dapat disebut sebagai salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*good government*). Kemudian berbagai

macam pelayanan publik yang turut mejadi lebih efisien akibat dari adanya wabah COVID-19 dapat disebut dengan terpenuhinya prinsip (*good governance*). Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat ter-dampak mampu untuk memaknai permasalahan COVID-19 sebagai permasalahan kolektif, sehingga muncul rasa keterbukaan dan tanggungjawab untuk meringankan beban kerja dari Pemerintah Ponorogo.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dipakai adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan rujukan ilmiah dari berbagai jurnal serta pemberitaan berbagai media kredibel dan secara sifat memang relevan atau layak untuk dijadikan sebagai rujukan ilmiah.

Studi kepustakaan memiliki definisi sebagai suatu aktivitas dalam rangka pengumpulan sumber-sumber data pustaka, serta melakukan pengolahan terhadap data penelitian (Zed dalam Supriyadi, 2017). Selain itu terdapat beberapa karakteristik dari metode studi pustaka (Zed dalam Supriyadi, 2017), yaitu:

1. *Peneliti/penulis bersentuhan langsung dengan narasi atau teks, serta data angka yang sumbernya tidak diperoleh langsung melalui survey lapangan*
2. *Peneliti tidak melakukan terjun langsung ke lapangan, karena data bersifat siap pakai dari berbagai sumber pustaka*
3. *Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data sekunder yang sumber utama nya didapat oleh peneliti lain*
4. *Situasi dan kondisi ruang dan waktu tidak membatasi data pustaka.*

Penelitian deskriptif menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, dan mendeskripsikan tentang berbagai macam fakta akurat dan sifat pada objek penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah berjenis data sekunder, karena metode perolehan data-nya adalah studi kepustakaan. Melalui landasan teori (kerangka konseptual), peneliti melakukan operasionalisasi konsep yang kemudian menghasilkan variabel dan indikator.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana realita pengalihan anggaran dari Pemerintah Ponorogo sebagai solusi atas hambatan ekonomi yang terjadi pada kehidupan masyarakat, dengan cara mengalihkan anggaran-anggaran non prioritas yang bersumber dari APBD.

4. Kesimpulan

Agenda pembangunan dalam bidang kesejahteraan ekonomi dan masyarakat merupakan rutinitas utama yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mengatur perencanaan maupun implementasi. Namun, wabah COVID-19 telah secara nyata membuat keadaan perekonomian maupun realisasi pembangunan menjadi

mandeg (terhambat). Tak terkecuali di Ponorogo sendiri, dimana pemerintah Ponorogo melalui Bupati dan segenap jajarannya juga mendapati permasalahan yang sama sebagai imbas dari tak terkendalinya COVID-19. Dampak serius dari COVID-19 telah menjalar ke berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat Ponorogo, sehingga kebijakan pengalihan anggaran yang dilakukan adalah keputusan tepat. Pemerintah Ponorogo telah memenuhi prinsip *good government*, dengan menitikberatkan urusan orang banyak sebagai fokus utama.

Pemerintah Ponorogo telah secara serius menangani krisis yang terjadi, dibuktikan dengan komitmen dan beberapa rapat khusus yang telah diselenggarakan untuk menentukan kebijakan pengalihan anggaran serta kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Seluruh bentuk kebijakan yang dilaksanakan adalah menitikberatkan pada mendesaknya kebutuhan ekonomi masyarakat (prioritas) di masa pandemi COVID-19, agar kondisi dan target pembangunan ekonomi ikut mengalami pemulihan.

Krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat Ponorogo akibat COVID-19, sejatinya juga memiliki implikasi dengan agenda pembangunan nasional. Perumpamaannya adalah, ketika suatu daerah tidak berada dalam kondisi perekonomian yang baik (akibat krisis) maka daerah tersebut tidak mampu untuk mendongkrak indeks perekonomian nasional, sehingga agenda pembangunan nasional menjadi terhambat. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat di tiap-tiap daerah merupakan neraca penting yang perlu didukung oleh kinerja total pemerintah.

Inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo, merupakan substansi mutlak dengan tujuan positif, mendesak, maupun sesegera mungkin. Pemerintah Ponorogo berperan sebagai ujung tombak, yang bertindak atas di tengah situasi rawan akibat COVID-19. Dengan demikian, wajar saja jika perencanaan anggaran yang telah disusun dari jauh-jauh hari sebelumnya terpaksa direvisi dengan banyak upaya penyesuaian dan pertimbangan terbaik. Setelah penerapan kebijakan pengalihan anggaran, maka selanjutnya adalah lebih kepada monitoring perkembangan situasi di lapangan.

Selalu adanya skala prioritas dalam merumuskan cara-cara untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sesungguhnya dapat disebut sebagai salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*good government*). Kemudian berbagai macam pelayanan publik yang turut mejadi lebih efisien akibat dari adanya wabah COVID-19 dapat disebut dengan terpenuhinya prinsip (*good governance*). Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat ter-dampak mampu untuk memaknai permasalahan COVID-19 sebagai permasalahan kolektif, sehingga muncul rasa keterbukaan dan tanggungjawab untuk meringankan beban kerja dari Pemerintah Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Dan Program Potensial Untuk Penanganannya: Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat. *Sosial*, 20(1), 48–57.
- Bungaran Saragih. *Agribisnis*. IPB Press. Bogor. 2011
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Of Education, Psychology, and Counselling*, 2, 146–153.
- Harahap, I. (2019). *Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner*. Perdana Publishing.
- Hasibuan, L. S. (2014). Pengaruh faktor-faktor kependudukan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14, 26–37.
- Kominfo Ponorogo. (2020a). *Di Ponorogo, Anggaran Perjalanan Dinas Sampai Belanja Non-Prioritas Dialihkan Ke Penanganan COVID-19*. <https://ponorogo.go.id/2020/04/14/di-ponorogo-anggaran-perjalanan-dinas-sampai-belanja-non-prioritas-dialihkan-ke-penanganan-COVID-19/>
- Kominfo Ponorogo. (2020b). *Musrenbangkab Ponorogo Di 2021, Infrastruktur-Pertanian-Pariwisata Jadi Prioritas*. <https://ponorogo.go.id/2020/04/14/musrenbangkab-ponorogo-di-2021-infrastruktur-pertanian-pariwisata-jadi-prioritas/>
- Mutia Sari, Mohd, Nur Syechalad, S. A. M. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 109–115.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 5(2), 212-224.
- Priyono, J. (2009). Mekanisme Penggalangan Dana Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah: Belajar dari Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF). *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 2(1), 1–21.
- Rusiadi, R., Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati, V. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jepa*, 5(2), 173-182.
- Solopos.com. *Pemkab Ponorogo Gelontorkan Rp31 Miliar Untuk Atasi Covid-19 Dan Dampaknya*. <https://www.solopos.com/pemkab-ponorogo-gelontorkan-rp31-miliar-untuk-atasi-covid-19-dan-dampaknya-105669>
- Solopos.com. (2020b). *Sudah Gelontor Rp10 Miliar, Pemkab Ponorogo Masih Punya Rp85 Miliar Untuk Covid-19*. <https://www.solopos.com/sudah-gelontor-rp10-miliar-pemkab-ponorogo-masih-punya-rp85-miliar-untuk-covid-19-1063214>
- Solopos.com. (2020c). *Warga Ponorogo Terdampak Corona Akan Dapat Bantuan Senilai Rp200.000*.

<https://www.solopos.com/warga-ponorogo-terdampak-corona-akan-dapat-bantuan-senilai-rp200-000-1055261>

- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6, 115–130. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>.
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Susilastuti, D. (2011). Pembangunan Ekonomi dan Kepedulian Masa Depan. *Jurnal Ekonomi*, 13.
- Todaro, Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 10*, Erlangga, Jakarta
- Zed, Mestika 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia